ANALISIS STRUKTURAL FUNGSIONAL ATAS RESPONS PEMERINTAH BANDAR LAMPUNG TERHADAP PENANGANAN JALAN BERLUBANG

Rara Agusti Maharani^{1*}, Vertika Baizuri¹, Damar Wibisono², Imam Mahmud², Usman Raidar²

1) Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

* Email: raramaharani278@gmail.com

Abstract :

The problem of potholes in Bandar Lampung not only reflects poor infrastructure, but also the dysfunction of public services in responding to community needs. Potholes contribute to increasing traffic accidents and harm the regional economy. Social media has become the main medium for residents to voice their complaints about road conditions, but the government's response tends to be slow, reactive, and unplanned. This study uses a qualitative approach with literature study methods and social media analysis to examine the effectiveness of the government's response to public demands. Using Talcott Parsons' structural functionalism perspective, this study found that the government system failed in terms of policy adaptation, integration of community aspirations, and achievement of goals in improving infrastructure quality. The results of the study show that unbalanced budget allocation, complex bureaucracy, and minimal community participation in decision-making are the main factors that hinder sustainable road repair. Therefore, this study recommends the need for reform in the management of infrastructure policies, including the integration of digital monitoring systems, transparency of budget allocations, and increased public involvement in planning and monitoring road repairs. With these steps, it is hoped that public services in the infrastructure sector can be more responsive and effective in responding to community needs.

Abstrak :

Permasalahan jalan berlubang di Bandar Lampung tidak hanya mencerminkan buruknya infrastruktur, tetapi juga disfungsi pelayanan publik dalam merespons kebutuhan masyarakat. Jalan berlubang berkontribusi pada meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas dan merugikan perekonomian daerah. Media sosial telah menjadi sarana utama bagi warga untuk menyuarkan keluhan mereka terhadap kondisi jalan, namun respons pemerintah cenderung lambat, reaktif, dan tidak terencana. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan analisis media sosial untuk mengkaji efektivitas respons pemerintah terhadap tuntutan publik. Dengan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, penelitian ini menemukan bahwa sistem pemerintahan mengalami kegagalan dalam aspek adaptasi kebijakan, integrasi aspirasi masyarakat, serta pencapaian tujuan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alokasi anggaran yang tidak seimbang, birokrasi yang kompleks, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi faktor utama yang menghambat perbaikan jalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi dalam pengelolaan kebijakan infrastruktur, termasuk integrasi sistem pemantauan digital, transparansi alokasi anggaran, serta peningkatan keterlibatan publik dalam perencanaan dan pengawasan perbaikan jalan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelayanan publik dalam sektor infrastruktur dapat lebih responsif dan efektif dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Keyword: *potholes, public services, infrastructure policy, social media, government response*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan aspek fundamental dalam kehidupan bermasyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan penduduk (UUD 1945). Kualitas pelayanan publik menjadi indikator utama keberhasilan tata kelola pemerintahan (*good governance*), yang ditentukan oleh efektivitas aparatur negara

dalam menjalankan tugasnya (Mustanir, 2022). Siring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat pasca-reformasi, ekspektasi terhadap layanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif semakin tinggi.

Di era digital, media sosial telah menjadi sarana utama bagi masyarakat untuk menyampaikan opini serta kritik

terhadap pelayanan publik, termasuk dalam permasalahan infrastruktur (Universitas Medan Area, 2024). Platform seperti Twitter, Instagram memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan keluhan secara terbuka, mempercepat penyebaran informasi, serta mendorong diskusi publik mengenai kebijakan pemerintah. Hal ini menciptakan dinamika baru dalam hubungan antara pemerintah dan warga, di mana transparansi dan kecepatan respons menjadi tuntutan utama.

Salah satu permasalahan infrastruktur yang paling sering disoroti di media sosial adalah kondisi jalan berlubang di Bandar Lampung. Masalah ini tidak hanya mengancam keselamatan pengguna jalan, tetapi juga berdampak pada kelancaran lalu lintas dan perekonomian daerah. Masyarakat kerap membagikan bukti visual dan lokasi jalan rusak di media sosial untuk mendesak pemerintah segera bertindak (Husin, 2022). Namun, meskipun kritik terus disuarakan, perbaikan yang dilakukan pemerintah sering kali bersifat sementara dan tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh (Sunaryo & Agustina, 2025).

Kondisi jalan yang buruk di Bandar Lampung berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan laporan Ditlantas Polda Lampung, sepanjang tahun 2024 tercatat 1.665 kasus kecelakaan lalu lintas dengan 653 korban jiwa. Meskipun jumlah ini mengalami penurunan sebesar 5,55% dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan 1.736 insiden, angka tersebut masih tergolong tinggi. Faktor utama kecelakaan di Lampung meliputi kesalahan manusia, kendaraan over-dimension and overloading (ODOL), minimnya penerangan, serta kondisi jalan yang rusak (Polda Lampung, 2022).

Selain berdampak pada keselamatan, kondisi infrastruktur jalan yang buruk juga mempengaruhi mobilitas dan perekonomian masyarakat. Data dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung (2024) menunjukkan bahwa dari total panjang jalan provinsi yang mencapai 1.693,273 km, sekitar 23,15% berada dalam kondisi tidak mantap.

Rinciannya adalah 256,471 km rusak berat, 131,076 km rusak ringan, dan 468,630 km rusak sedang. Kerusakan jalan yang signifikan ini menghambat distribusi barang dan jasa, meningkatkan biaya operasional transportasi, serta memperparah kemacetan di kawasan perkotaan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum optimal dalam memastikan kualitas infrastruktur jalan yang memadai. Meski perbaikan jalan rutin dilakukan, banyak yang hanya bersifat tambal sulam tanpa solusi jangka panjang (Sunaryo & Agustina, 2025). Kurangnya perencanaan pemeliharaan yang berkelanjutan menyebabkan masalah jalan berlubang terus berulang, sehingga menambah ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik di sektor infrastruktur.

Penelitian ini berfokus pada peran media sosial sebagai alat advokasi masyarakat dalam mengkritisi kebijakan pemerintah terkait perbaikan jalan di Bandar Lampung, serta menilai efektivitas respons pemerintah terhadap keluhan publik. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih menyoroti aspek teknis perbaikan jalan dan dampaknya terhadap keselamatan serta ekonomi (Marsaid et al., 2013), penelitian ini menitikberatkan pada dinamika interaksi antara masyarakat dan pemerintah dalam proses pengambilan kebijakan publik. Urgensi penelitian ini terletak pada adanya kerusakan jalan berlubang di Bandar Lampung berdampak langsung pada keselamatan masyarakat. Kondisi tersebut telah memicu tingginya angka kecelakaan lalu lintas serta kerugian sosial-ekonomi. Selain itu, lambannya respons pemerintah memperburuk krisis kepercayaan publik terhadap pelayanan infrastruktur.

Dengan pendekatan kualitatif yang menggabungkan analisis media sosial dan kebijakan infrastruktur, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana transparansi dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan rekomendasi bagi pengambil kebijakan dalam mengelola respons terhadap aspirasi masyarakat secara lebih efektif. Dengan semakin meningkatnya penggunaan media sosial sebagai sarana advokasi publik, pemerintah perlu mengoptimalkan teknologi digital sebagai alat monitoring dan evaluasi kebijakan guna meningkatkan pelayanan infrastruktur jalan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana masyarakat Bandar Lampung memanfaatkan media sosial dalam menyuarakan keluhan terhadap infrastruktur jalan yang rusak, serta bagaimana pemerintah meresponsnya. Studi ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari jurnal akademik, laporan instansi pemerintah, laman berita, serta penelitian terdahulu terkait media sosial dan pelayanan publik di sektor infrastruktur (Zed, 2008).

Data dikumpulkan melalui telaah literatur dan analisis dokumen pemerintah guna memahami pola komunikasi masyarakat serta kebijakan pemerintah dalam menanggapi aduan publik. Kajian akademik digunakan untuk mengkaji konsep *good governance* dan transparansi dalam pelayanan publik digital, sementara laporan dari Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung memberikan data empiris terkait kondisi jalan serta tingkat kerusakan infrastruktur. Analisis media sosial dilakukan dengan merujuk pada penelitian sebelumnya yang membahas pola interaksi masyarakat dalam menyampaikan keluhan terhadap layanan publik melalui platform digital.

Pendekatan fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons digunakan untuk menjelaskan bagaimana media sosial berperan sebagai mekanisme adaptasi dalam sistem sosial, memungkinkan masyarakat untuk menekan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan infrastruktur. Namun, jika respons pemerintah tidak efektif, maka terjadi disfungsi sosial yang mengganggu

keseimbangan sistem pelayanan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun apabila media sosial hanya menjadi wadah keluhan tanpa diiringi tindakan nyata dari pihak berwenang.

Melalui metode ini, penelitian ini berupaya menyoroti peran media sosial dalam menjaga keseimbangan sosial dan efektivitas kebijakan publik, terutama dalam konteks perbaikan infrastruktur jalan di Bandar Lampung. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan dalam meningkatkan responsivitas pemerintah, sehingga pelayanan infrastruktur menjadi lebih optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pendekatan penelitian kepustakaan sebagaimana dijelaskan oleh Zed (2008). Pendekatan ini menekankan telaah kritis terhadap literatur dan dokumen sebagai dasar untuk membangun kerangka konseptual dan argumentasi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Infrastruktur Jalan Berlubang di Bandar Lampung

Kondisi Infrastruktur jalan di Bandar Lampung telah lama menjadi sorotan akibat banyaknya jalan berlubang yang mengancam keselamatan pengguna. Data Dinas Perhubungan yang tercatat pada BPS Lampung (2022) menunjukkan bahwa 30% peningkatan kecelakaan lalu lintas dalam dua tahun terakhir disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak. Dari 200 kasus kajian studi kasus media sosial. Literatur kecelakaan per tahun, dengan 50% di antaranya terkait langsung dengan jalan berlubang. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga meningkatkan risiko cedera fatal bagi pengendara.

Penyebab utama kerusakan jalan adalah faktor cuaca ekstrem, beban kendaraan yang melebihi kapasitas, serta kurangnya pemeliharaan berkala. Curah hujan tinggi di Bandar Lampung

mempercepat degradasi jalan, terutama di area yang tidak dilengkapi drainase memadai. Selain itu, pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 8% per tahun turut memperburuk beban infrastruktur (Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung., 2022). Kombinasi faktor alam dan antropogenik ini menciptakan lingkaran kerusakan yang sulit diatasi tanpa intervensi sistematis.

Upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah selama ini dinilai tidak efektif. Metode penambalan lubang hanya bersifat sementara, dengan material yang mudah terkikis dalam hitungan minggu. Misalnya, di Jalan Soekarno-Hatta, perbaikan dilakukan 3-4 kali dalam setahun untuk lubang yang sama, menunjukkan ketiadaan solusi struktural. Praktik ini tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.

Alokasi anggaran menjadi masalah krusial dalam penanganan jalan berlubang. Menurut Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kota Bandar Lampung tahun 2022, dari total anggaran infrastruktur sebesar Rp 1,2 triliun, hanya 15% (Rp 180 miliar) yang dialokasikan untuk pemeliharaan jalan, sementara 85% (Rp 1,02 triliun) digunakan untuk proyek baru. Data ini dapat diakses melalui situs resmi Pemerintah Kota Bandar Lampung. Ketimpangan ini menyebabkan prioritas perbaikan jalan yang rusak terabaikan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung tahun 2022, kerugian ekonomi akibat kecelakaan lalu lintas di Bandar Lampung mencapai Rp 12 miliar per tahun, termasuk biaya perbaikan kendaraan, perawatan medis, dan kehilangan produktivitas. Data ini dapat diakses melalui publikasi resmi BPS Lampung.

Peran Media Sosial dalam Menyuarakan Keluhan Masyarakat

Media sosial telah menjadi saluran utama bagi masyarakat Bandar Lampung untuk menyampaikan keluhan terkait jalan berlubang. Platform seperti Twitter dan Instagram digunakan untuk membagikan foto, video, dan narasi tentang kondisi jalan yang membahayakan. Tagar seperti

#JalanRusakBandarLampung sering muncul, terutama saat musim hujan, mencerminkan upaya kolektif untuk menarik perhatian pemerintah dan media massa (Kompas, 2024).

Analisis konten menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan media sosial sebagai alat advokasi partisipatif. Misalnya, warga sering melampirkan lokasi spesifik dan menandai akun resmi pemerintah dalam unggahan mereka. Pola ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga memfasilitasi crowdsourcing data kerusakan jalan. Sebuah akun Instagram bahkan membuat peta interaktif yang menampilkan titik-titik jalan rusak dalam kurun waktu tertentu (Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Lampung, 2024).

Media sosial juga berperan sebagai ruang diskusi publik yang mengkritik kebijakan pemerintah. Komentar seperti, "Sudah 3 kali dilapor, kapan diperbaiki?" menunjukkan frustrasi terhadap respons yang lambat. Unggahan terkait jalan berlubang sering mengandung nada sindiran atau protes, mengindikasikan krisis kepercayaan terhadap institusi resmi (Kompas, 2024).

Meski efektif menciptakan tekanan publik, penggunaan media sosial memiliki keterbatasan. Tidak semua keluhan disertai data spesifik, sehingga menyulitkan verifikasi oleh pemerintah. Selain itu, algoritma platform cenderung memprioritaskan konten viral daripada isu kronis, membuat keluhan rutin mudah tenggelam. Hal ini menunjukkan perlunya sistem pelaporan terstruktur yang mengintegrasikan media sosial dengan saluran resmi (Megashift Fisipol Ugm, 2024).

Pergeseran partisipasi dari saluran formal ke media sosial mencerminkan perubahan dinamika demokrasi digital. Masyarakat, terutama generasi muda, lebih memilih platform daring karena dianggap lebih cepat dan transparan (Fibri & Ernawati, 2025).

Namun, tanpa regulasi yang jelas, potensi misinformasi dan hoaks tentang proyek perbaikan jalan tetap menjadi

tantangan. Studi ini merekomendasikan pembuatan portal resmi yang mengakomodasi aspirasi media sosial untuk meminimalkan kesenjangan komunikasi (Megashift Fisipol UGM, 2024).

Respons Pemerintah dan Faktor Penghambat Efektivitas

Respons pemerintah terhadap keluhan jalan berlubang cenderung reaktif dan tidak terencana. Menurut Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung tahun 2022, sekitar 70% perbaikan jalan dilakukan dalam 1-2 minggu setelah keluhan masyarakat menjadi viral di media sosial. Data ini dapat diakses melalui laporan resmi Dinas PUPR Kota Bandar Lampung. Misalnya, di Jalan Teuku Umar, perbaikan hanya dilakukan pada 40% area yang dilaporkan rusak.

Birokrasi yang rumit menjadi penghambat utama respons cepat. Laporan masyarakat harus melalui 4-5 tahap administrasi sebelum ditindaklanjuti, termasuk verifikasi lapangan dan pengajuan anggaran (Maharani et al., 2023). Proses ini memakan waktu rata-rata 3 bulan, sementara kerusakan jalan terus meluas. Selain itu, koordinasi antar dinas (PUPR, Perhubungan, dan BPBD) sering tumpang tindih, memperlambat eksekusi perbaikan. Keterbatasan anggaran dan korupsi dana infrastruktur turut memengaruhi kualitas respons.

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2022, sekitar 25% dari total anggaran pemeliharaan jalan di Bandar Lampung tidak digunakan sesuai peruntukan. Data ini dapat diakses melalui situs resmi BPK

Alokasi dana yang tersisa seringkali diprioritaskan untuk proyek fisik baru yang lebih terlihat secara politis. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan kebijakan masih minim. Forum konsultasi publik hanya diadakan 1-2 kali setahun, dengan peserta terbatas pada perwakilan Kelurahan. Akibatnya, kebutuhan riil warga

di tingkat RT/RW sering tidak terakomodasi. Padahal, partisipasi aktif masyarakat dalam pemantauan bisa meningkatkan efektivitas perbaikan jalan hingga 50% (Sari, 2022).

Teknologi menjadi solusi potensial untuk meningkatkan responsivitas. Menurut Laporan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandar Lampung tahun 2023, dari total keluhan yang masuk melalui aplikasi "LAPOR Jalan", hanya 15% yang ditindaklanjuti dalam waktu 30 hari. Data ini dapat diakses melalui laporan resmi Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung.

Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah di tahun 2025 saat ini tidak berdampak signifikan terhadap pengerjaan infrastruktur jalan. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Lampung, Muhammad Taufiqullah, kebijakan efisiensi anggaran diterapkan di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk di sektor infrastruktur jalan. Namun, perbaikan jalan tetap dapat berjalan, terutama di wilayah dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi dan tingkat kerusakan yang cukup parah. Hal ini dimungkinkan karena selain mengandalkan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, Provinsi Lampung juga memiliki sumber pendapatan asli daerah yang mendukung pembiayaan pembangunan jalan (Suara Lampung, 2023).

Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan 52 paket perbaikan jalan dengan total nilai anggaran sebesar Rp450 miliar serta 21 paket perbaikan jembatan dengan nilai Rp49 miliar. Taufiqullah menambahkan bahwa anggaran ini justru mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun lalu, total anggaran yang dialokasikan setelah APBD Perubahan mencapai Rp550 miliar, sedangkan tahun ini anggaran murni yang telah ditetapkan mencapai Rp770 miliar. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Lampung (Ismanto, 2025).

Saat ini, terdapat enam ruas jalan utama yang sedang dalam proses

perbaikan, yaitu ruas jalan Pringsewu-Kalirejo, Kalirejo-Bangunrejo, Bandar Jaya-Mandala, Kotabumi-Bandar Lampung, Jabung-Labuhan Maringgai, dan Metro-Tanjung Karang. Proyek-proyek ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendukung kelancaran mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa di wilayah tersebut.

Meskipun begitu, masih terdapat tantangan dalam perbaikan jalan, terutama pada ruas jalan nasional yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Salah satu contoh adalah jalan nasional di Pringsewu yang mengalami keterlambatan perbaikan akibat proses penganggaran yang memakan waktu. Kondisi ini sempat memicu protes masyarakat, terutama karena sejumlah kecelakaan terjadi akibat jalan berlubang di wilayah tersebut. Pemerintah menyatakan bahwa saat ini anggaran untuk perbaikan jalan nasional tengah dalam proses penyusunan sehingga perbaikan akan segera dilakukan.

Dengan demikian, meskipun kebijakan efisiensi anggaran diterapkan secara luas, Pemerintah Provinsi Lampung tetap berupaya memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan tidak terhambat secara signifikan, terutama di daerah yang membutuhkan penanganan segera. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pembiayaan yang mengombinasikan sumber pendapatan daerah dan dana pusat menjadi kunci dalam menjaga kelangsungan proyek pembangunan infrastruktur jalan di tengah keterbatasan anggaran.

Analisis Fenomena Berdasarkan Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons

Pendekatan Struktural Fungsional menggambarkan masyarakat layaknya organisme hidup, di mana setiap bagian memiliki peran dan saling bergantung untuk menjaga keseimbangan sistem. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas, integrasi, fungsi, koordinasi, dan konsensus dalam menciptakan keteraturan sosial. Dalam perspektif fungsionalisme, nilai-nilai normatif dan pola perilaku sosial berperan sebagai fondasi utama dalam

mempertahankan harmoni masyarakat (Binti, 2016).

Menurut Parsons (dalam Amin, 2024), keseimbangan sosial akan tercapai ketika institusi dan lembaga dalam masyarakat berfungsi secara efektif dalam menjaga stabilitas. Struktur sosial yang berjalan sesuai fungsinya serta tetap menjunjung nilai dan norma yang berlaku akan membentuk masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Binti (dalam Amin, 2014).

Talcott Parsons (dalam Amin, 2024) melalui kerangka AGIL (Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency) menggambarkan bagaimana kegagalan sistem pemerintahan dalam menangani jalan berlubang di Bandar Lampung mencerminkan disfungsi sosial yang lebih luas. Dalam aspek Adaptasi (A), pemerintah seharusnya menyesuaikan kebijakan dengan kondisi yang terus berkembang, seperti peningkatan jumlah kendaraan dan perubahan cuaca. Namun, kebijakan yang diambil masih bersifat sementara, seperti tambal-sulam, tanpa mempertimbangkan solusi jangka panjang yang lebih tahan terhadap degradasi. Akibatnya, masalah ini terus berulang tanpa ada perbaikan sistematis yang mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Selanjutnya, aspek Pencapaian Tujuan (G) dan Integrasi (I) juga tidak berjalan efektif.

Tujuan utama perbaikan jalan seharusnya bukan hanya sekadar menutup lubang, tetapi memastikan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. Sayangnya, kebijakan yang ada lebih berorientasi pada kuantitas perbaikan dibandingkan dampaknya terhadap pengurangan kecelakaan atau peningkatan mobilitas (Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023). Di sisi lain, media sosial berperan sebagai jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan pemerintah. Namun, tanpa adanya mekanisme formal yang mengubah keluhan daring menjadi kebijakan nyata, tekanan publik sering kali hanya berujung pada tindakan simbolis, seperti viralnya keluhan di Twitter tanpa evaluasi kebijakan yang berkelanjutan.

Terakhir, Pemeliharaan Pola (L) terganggu akibat menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Ketika layanan dasar seperti infrastruktur jalan tidak dikelola dengan baik, masyarakat semakin skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan mereka (Kamil, 2018). Survei menunjukkan bahwa 65% warga ragu apakah laporan mereka akan benar-benar ditindaklanjuti, yang pada akhirnya berpotensi mengganggu stabilitas sosial (Amin, 2024). Krisis kepercayaan ini tidak hanya berdampak pada hubungan masyarakat dengan pemerintah, tetapi juga melemahkan semangat kolektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik.

Respons Reaktif dan Tidak Terencana

Respons pemerintah terhadap keluhan jalan berlubang di Bandar Lampung cenderung bersifat reaktif dan tidak terencana dengan baik. Menurut Laporan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bandar Lampung tahun 2022, sekitar 70% perbaikan jalan dilakukan dalam waktu 1-2 minggu setelah keluhan masyarakat menjadi viral di media sosial. Data ini dapat diakses melalui laporan resmi Dinas PUPR Kota Bandar Lampung. Respons yang cepat ini terlihat positif di permukaan, namun sayangnya, perbaikan yang dilakukan seringkali bersifat parsial dan tidak menyeluruh. Pemerintah cenderung hanya menanggapi masalah yang telah menarik perhatian publik melalui media sosial, sementara keluhan yang tidak viral seringkali diabaikan atau ditanggapi dengan lambat.

Sebagai contoh, di Jalan Teuku Umar, salah satu ruas jalan utama di Bandar Lampung, perbaikan hanya dilakukan pada 40% area yang dilaporkan rusak oleh masyarakat. Sisanya, yang juga dalam kondisi buruk, dibiarkan tanpa penanganan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih fokus pada penanganan simbolis untuk meredakan tekanan publik daripada melakukan perbaikan yang komprehensif dan berkelanjutan. Perbaikan yang dilakukan juga seringkali bersifat

tambal sulam, menggunakan material yang tidak tahan lama, sehingga jalan kembali rusak dalam waktu singkat, terutama saat musim hujan. Praktik ini tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi juga menimbulkan kesan bahwa pemerintah tidak serius dalam menangani masalah infrastruktur jalan.

Selain itu, respons yang reaktif ini juga menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dari pemerintah. Alih-alih melakukan pemetaan dan identifikasi masalah secara menyeluruh, pemerintah hanya menunggu keluhan masyarakat muncul di media sosial sebelum bertindak. Padahal, seharusnya pemerintah memiliki sistem pemantauan dan perencanaan yang proaktif untuk mengantisipasi kerusakan jalan sebelum masalah tersebut menjadi viral. Kurangnya perencanaan ini menyebabkan perbaikan yang dilakukan tidak efektif dan hanya bersifat sementara, sehingga masalah jalan berlubang terus berulang dari tahun ke tahun.

Dampak dari respons yang reaktif dan tidak terencana ini tidak hanya terbatas pada kerusakan fisik jalan, tetapi juga memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat semakin skeptis terhadap kemampuan pemerintah dalam menyelesaikan masalah infrastruktur, terutama ketika melihat bahwa perbaikan yang dilakukan hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyelesaikan masalah secara tuntas. Hal ini memperdalam jurang ketidakpercayaan antara masyarakat dan pemerintah, yang pada akhirnya dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik di tingkat lokal.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jalan berlubang di Bandar Lampung bukan hanya masalah teknis, tetapi juga cerminan dari ketidakefektifan sistem pemerintahan dalam merespons kebutuhan masyarakat. Data kecelakaan yang meningkat dan keluhan publik yang terus muncul mengindikasikan bahwa perbaikan infrastruktur jalan belum menjadi prioritas utama. Selain faktor cuaca dan beban kendaraan, kebijakan yang tidak terencana

serta alokasi anggaran yang tidak seimbang turut memperburuk kondisi ini.

Media sosial telah menjadi alat utama bagi masyarakat untuk menyuarakan keluhan mereka, tetapi tanpa sistem yang terstruktur, aspirasi ini sering kali hanya berujung pada respons simbolis. Pemerintah cenderung bertindak reaktif terhadap tekanan publik tanpa solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Kegagalan dalam membangun mekanisme integratif antara masyarakat dan pemerintah menyebabkan rendahnya efektivitas perbaikan jalan, yang pada akhirnya memperkuat ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

REKOMENDASI RISET

Sebagai langkah perbaikan, pemerintah perlu mengadopsi pendekatan yang lebih sistematis dalam menangani infrastruktur jalan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, pemanfaatan teknologi untuk pemantauan jalan, serta peningkatan partisipasi publik dalam perencanaan kebijakan menjadi kunci utama. Dengan memperkuat koordinasi antar lembaga dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan kebijakan infrastruktur dapat lebih responsif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, H. (2024). Teori Struktural Fungsional Talcott Parsons. Dalam Rasulu & Munaeni. *Teori Sosiologi*, hal 62 - 76.
- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (2022). Laporan Hasil Pemeriksaan (Lhp) Pemeliharaan Jalan Di Bandar Lampung. Diakses Dari <https://www.bpk.go.id> Diakses pada tanggal 11 November 2024
- Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung. (2022). Kerugian Ekonomi Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Bandar Lampung. Diakses Dari <https://lampung.bps.go.id> Diakses pada tanggal 11 November 2024
- Binti, M. (2016). "Pendidikan Dalam Perspektif Struktural Fungsional." *Cendekia: Journal Of Education And Teaching* 10(2):159. Doi: 10.30957/Cendekia.V10i2.136.
- Dinas Bina Marga Dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung. (2022). Laporan Kondisi Infrastruktur Jalan Provinsi Lampung Tahun 2022. Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung.
- Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandar Lampung. (2023). Laporan Kinerja Aplikasi "Lapor Jalan" Tahun 2023. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Kota Bandar Lampung. (2022). Laporan Respons Pemerintah Terhadap Perbaikan Jalan Tahun 2022. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Fibri, Y. H., & Ernawati, E. (2025). Keputusan Wisata Generasi Z: Eksplorasi Peran Media Sosial Di Taman Margasatwa Dan Budaya Kinantan Bukittinggi. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 7(1), 13-27.
- Husin. A. (2022). "Hati-Hati, Ini 5 Titik Jalan Paling Rawan Kecelakaan Di Lampung." *Liputan6*. Retrieved (<https://www.liputan6.com/regional/read/5099605/hati-hati-ini-5-titik-jalan-paling-rawan-kecelakaan-di-lampung>). Diakses pada tanggal 11 November 2024
- Ismanto, J. (2025, 26 Februari). *Anggaran Perbaikan Jalan Tak Kena Efisiensi, Lebaran Jalan Di Lampung Akan Mulus*. *Warta9.Com*. Retrieved (<https://warta9.com/anggaran-perbaikan-jalan-tak-kena-efisiensi-lebaran-jalan-di-lampung-akan-mulus/?amp=1>) Diakses pada tanggal 11 November 2024

- Kamil, I. (2018). Peran Komunikasi Pemerintahan Dalam Penanganan Lingkungan Kumuh. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 11(1), 129-139.
- Kompas. (2024, April 24). *Saat Warga Memilih Protes Jalan Rusak Lewat Media Sosial*. Retrieved (<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/04/24/saat-warga-memilih-protes-jalan-rusak-lewat-media-sosial>) Diakses pada tanggal 11 November 2024
- Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. (2022). Statistik Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2022. Diakses Dari <https://korlantas.polri.go.id> Diakses pada tanggal 11 November 2024
- Maharani, A., Fahrozi, R., & Nurhaliza, A. A. (2023). Peran Pemerintah Kota Dalam Menanggulangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Bandar Lampung Akibat Kerusakan Infrastruktur Jalan. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, 2(3), 183-197.
- Marsaid, M., Hidayat, M., & Ahsan, A. (2013). Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Pada Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Kabupaten Malang. *Jurnal Ilmu Keperawatan*, 1(2), 98-112.
- Megashift Fisipol Ugm. (2024). *Fenomena New Public Sphere: Disrupsi Media Sosial Yang Mempengaruhi Gaya Artikulasi Kepentingan Publik Masa Kini*. Universitas Gadjah Mada.
- Mustanir, A. (2022). *Pelayanan Publik*. Penerbit Qiara Media.
- Pemerintah Kota Bandar Lampung. (2022). Laporan Keuangan Daerah (Lkpd) Kota Bandar Lampung Tahun 2022. Bandar Lampung: Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- Ruth Meliana. 2023. "Tingkat Kematian Kecelakaan Lalu Lintas Di Lampung Lebih Tinggi Dari Jabodetabek, Warganet Ungkap Data Ini." *Suara News*. Retrieved (<https://www.suara.com/news/2023/04/17/161855/tingkat-kematian-kecelakaan-lalu-lintas-di-lampung-lebih-tinggi-dari-jabodetabek-warganet-ungkap-data-ini>). Diakses pada tanggal 11 November 2024
- Sari, W. Y. (2022). *Kinerja Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung dalam Pemeliharaan Jalan: Studi di Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tahun 2021* (Skripsi, Universitas Lampung). Universitas Lampung.
- Sunaryo, A., & Agustina, S. (2025, Maret 10). Terdampak Efisiensi Anggaran, Tak Ada Pembangunan Jalan Nasional Di Lampung Selama 2025, Hanya Ada Tambal Sulam. *Lampost.Co*. Retrieved (https://lampost.co/lampung/terdampak-efisiensi-anggaran-tak-ada-pembangunan-jalan-nasional-di-lampung-selama-2025-hanya-ada-tambal-sulam/#Goog_Rewarded) Diakses pada tanggal 11 November 2024
- Universitas Medan Area. 2024. Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial. *Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area*. Retrieved (<https://mh.uma.ac.id/kebebasan-berpendapat-melalui-media-sosial/>) Diakses pada tanggal 11 November 2024
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.